



PAPER – OPEN ACCESS

Program Konservasi Hutan Dan Lahan Berperspektif Gender Dalam Upaya Antisipasi Bencana Banjir Dan Longsor Di Segorogunung, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Author : Trisni Utami dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.639
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Program Konservasi Hutan Dan Lahan Berperspektif Gender Dalam Upaya Antisipasi Bencana Banjir Dan Longsor Di Segorogunung, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

*Forest and Land Conservation Program with Gender Perspective in Anticipating Flood and Landslide Disasters In
Segorogunung, Karanganyar, Central Java, Indonesia*

Trisni Utami^a, Bambang Santoso^b, Ismi D. A. Nurhaeni^c, Prabang Setyono^d, Suntoro^e

^{a,b}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^cProgram Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^dProdi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^eProdi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email : trisni_uns@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is a discussion about humans in forest conservation with a gender perspective to encourage renewal of landslides in Segorogunung, Karanganyar, Central Java. This research is a cooperative research (cooperative inquiry) which emphasizes group activities as research partners. The location of the study was conducted in Segorogunung Village, Karanganyar Regency. Research conducted by conducting joint activities in a group based on communication norms naturally and openly. The technique of collecting data is done by the Focused Discussion Method. The FGD was carried out by presenting 10 people who were members of the Forest Village Community Institution. Data analysis was performed with Interactive Model Analysis. The results showed that forest conservation activities in Segorogunung Village, Karanganyar Regency had no gender perspective. Forest conservation activities carried out through Forest Community Institutions (LMDH) are still carried out by men, while women have not been involved optimally. Women have not been involved in planning, implementing, monitoring and evaluating; and women are still limited.

Keywords: conservation, gender, disaster;

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari perilaku manusia dalam konservasi hutan berperspektif gender untuk mengantisipasi terjadinya bencana tanah longsor di Segorogunung, Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kooperatif (cooperative inquiry) yang lebih menekankan aktivitas kelompok sebagai mitra peneliti. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Segorogunung, Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan aktivitas bersama dalam sebuah kelompok berdasarkan norma-norma komunikasi secara alami dan terbuka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Metode Diskusi terfokus. FGD dilakukan dengan menghadirkan 10 orang yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Analisis data dilakukan dengan interaktif Analisis Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan konservasi hutan di Desa Segorogunung, Kabupaten Karanganyar belum berperspektif gender. Kegiatan konservasi hutan yang dilakukan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan belum terlibat secara optimal. Perempuan belum terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan perempuan masih terbatas membantu suami dalam kegiatan konservasi.

Kata Kunci: konservasi, gender, bencana;

1. Pendahuluan

Konservasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi tolok ukur dalam antisipasi bencana maupun tanah longsor. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana karena merupakan daerah cincin api (*ring of fire*) yang memungkinkan terjadinya banyak bencana.

DAS merupakan suatu wilayah daratan yang berdampingan dengan sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan serta mengalirkan air melalui badan sungai menuju ke laut atau danau. DAS dibagi menjadi tiga wilayah fungsi yaitu DAS Hulu, DAS Tengah dan DAS Hilir. Pengelolaan DAS perlu dilakukan agar tidak terjadi banjir pada musim hujan, tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau dan tidak terjadi erosi atau tanah longsor. DAS bagian hulu mengharuskan pengelolaan yang

perlu mendapatkan prioritas karenanya didaerah hulu perlu dilakukan konservasi hutan dan lahan, mengingat wilayah hulu memegang fungsi penting sebagai daerah tangkapan air. Bagian hulu yang lestari memungkinkan terserapnya curah hujan secara baik sehingga air yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan hilir akan lebih berkualitas. Sebaliknya rusaknya bagian hulu akan berdampak pada banjir. Penanganan pengelolaan DAS didaerah hulu secara baik merupakan jaminan keselamatan bagi penduduk di daerah hilir. Banjir yang terjadi di DAS Solo hilir boleh jadi diakibatkan oleh pengelolaan DAS Solo hulu yang belum optimal sesuai dengan peruntukannya. Akibat dari pengelolaan DAS Solo hulu yang belum optimal akan mengakibatkan pendangkalan sungai, banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau. Oleh karenanya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. DAS Solo hulu perlu mendapatkan penanganan yang serius karena wilayah hulu harus berfungsi sebagai water saving (penyimpan air) dan menghambat atau mengurangi kecepatan aliran permukaan, memperbaiki fungsi hutan sebagai penutup lahan terhadap pukulan air hujan, terbukanya lahan yang berbukit akan berakibat terjadinya erosi tanah, sedimentasi sungai atau waduk yang menyebabkan daya tampung sungai terhadap air hujan menjadi berkurang. Hal inilah yang dapat menimbulkan banjir pada musim penghujan tiba [1].

Pengelolaan DAS yang belum optimal akan mengakibatkan bencana banjir, kekeringan di musim kemarau dan tanah longsor serta erosi Informasi menunjukkan bahwa Sungai Solo sering terjadi luapan air yang menyebabkan banjir. Banjir besar terjadi pada tanggal 25 Desember 2007 yang menimbulkan tergenangnya rumah penduduk, fasilitas umum, sawah/tegalan yang ada disekitar Sungai Bengawansolo. Lahan kritis di Wilayah DAS Solo kategori potensial kritis sampai sangat kritis yang mencapai luas kurang lebih 11.398 Km² akibat proses erosi. Luas lahan kritis terbesar terdapat di Kabupaten Wonogiri seluas 128.662 ha. Erosi merupakan masalah utama dalam pengelolaan DAS Solo, dimana waduk serbaguna Wonogiri memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan umur efektif Waduk Serbaguna Wonogiri menurun dari 100 tahun menjadi 30 tahun, sehingga harus dilakukan pengerukan waduk [2]. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan semakin menurun. Untuk itu perlu dilakukan konservasi hutan dan lahan dalam suatu sistem DAS sehingga manajemen hutan dan lahan merupakan target keberhasilan pengelolaan DAS yang meliputi aspek tata air, tata guna lahan, tata vegetasi, Sumberdaya manusia (SDM).

Di Wilayah DAS Solo Hulu sub-DAS Samin Kabupaten Karanganyar juga mengalami penurunan daya dukung lingkungan karena sering terjadi tanah longsor. Data dan Informasi tentang tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Karanganyar dipaparkan pada Tabel 1.

Dalam upaya pengelolaan DAS Solo hulu diperlukan konservasi hutan dan lahan Tujuannya adalah untuk mendorong pelestarian hutan dan lahan sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas lingkungan. Ada beberapa asas yang perlu diterapkan dalam upaya konservasi hutan dan lahan dalam Pengelolaan Lingkungan DAS Solo antara lain asas tanggung jawab, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas keanekaragaman, asas partisipatif, asas kearifan lokal dan asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam *good governance* ini melibatkan tiga unsur besar yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam pelaksanaan *good governance* tersebut aspek kelembagaan berperspektif gender menjadi penting dan saling melengkapi dalam pengelolaan DAS

Tabel 1 . Data Bencana Tanah Longsor dan Kerugian di Kabupaten Karanganyar

No	Bencana Tanah Longsor	Kerugian
1	Bencana longsor, jembatan dan talud di dukuh Bono desa Plosorejo kecamatan Kerjo	Rp 17.000.000
2	Bencana tanah longsor di desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso	Rp 77.500.000
3	Bencana tanah longsor di desa Nglegok kecamatan Ngargoyoso	Rp 410.000.000
4	Bencana tanah longsor di dukuh Babatan desa Girilayu kecamatan. Matesih	Rp 52.500.000
5	Bencana tanah longsor Dukuh Gero Desa Karang Kecamatan Karangpandan	Rp 85.000.000
6	Tanah Longsor menimpa talut Jembatan Watu Tumpeng Desa Petung Kecamatan Jatiyoso	Rp 35.000.000

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2010.

Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya konservasi hutan dan lahan. Agar DAS tidak mengalami kerusakan yang akan berakibat erosi pada badan sungai dan banjir di kawasan hilir maka perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan konservasi lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, melalui pelibatan masyarakat yang tergabung dalam aktivitas konservasi DAS. Pelibatan masyarakat penting karena masyarakat akan lebih memiliki. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi masyarakat ketika masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan maka masyarakat akan lebih merasa memiliki (*sense of belonging*), lebih memiliki kepedulian untuk menjaga.

Konservasi hutan dan lahan berperspektif gender perlu dilakukan karena diharapkan upaya konservasi hutan dan lahan dalam pengelolaan DAS Solo akan menjadi lebih optimal dan lebih baik. Selama ini keterlibatan laki-laki dan perempuan masih belum seimbang. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berada dalam jumlah yang seimbang. Oleh karenanya perlu mengoptimalkan partisipasi laki-laki dan perempuan agar masing-masing kelompok dapat terlibat dan merasakan manfaatnya secara bersama-sama. Dari data penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan di desa Segoro Gunung, perempuan belum terlibat secara aktif.

Berkaitan dengan keberlanjutan usaha konservasi hutan dan lahan, perlu dikaji lebih lanjut sejauhmana perilaku petani telah berubah menuju terbentuknya masyarakat petani yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap kelestarian DAS. Di wilayah Sub DAS Kedoang petani banyak berusaha tani tanaman semusim dan tanaman sayuran sedangkan pada masyarakat Sub DAS Samin

atau masyarakat Lawu banyak berusaha tani melalui tanaman sayuran Tawangmangu. Kedua-duanya akan sangat berpengaruh terhadap pelestarian pengelolaan DAS Solo hulu. Penelitian ini juga mengkaji permasalahan terkait dengan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan dalam rangka pengelolaan DAS berwawasan lingkungan. Permasalahan yang akan dikaji lebih pada : (1) Bagaimanakah pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan untuk mendukung pengelolaan lingkungan DAS Solo Hulu demi mengurangi bencana?, (2) Merumuskan peran gender dalam konservasi hutan dan lahan guna mendukung Pengelolaan Lingkungan DAS Solo Hulu demi untuk mengurangi bencana?

Adapun kontribusi dalam penelitian ini adalah : (1) berkontribusi dalam pengembangan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan mendukung pengelolaan DAS berwawasan lingkungan sebagai antisipasi terjadinya bencana, (2) berkontribusi dalam pengembangan community base environment secara kuat (strong) melalui pelibatan perempuan dalam upaya pengelolaab DAS untuk mengurangi terjadinya bencana.

2. Kajian Literatur

Penelitian Nurhaeni dkk yang berjudul Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk mendukung pembangunan Berkelanjutan perlu dilakukan melalui keterlibatan asosiasi perempuan Peduli Lingkungan Hidup yang diwujudkan melalui gerakan-gerakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi antara lain produksi bersih, pembangunan kawasan terpadu berwawasan lingkungan dan pengelolaan limbah (padat dan cair) di lokasi industri rumah tangga batik [3]. Keterlibatan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender perlu dirumuskan dalam kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta evaluasi program.

Penelitian Cannel Elizabeth Price berjudul *Women and The Environmen : Mediating and Moderating Effect of Gender & Demographic Characteristics of Environment Concern* menyimpulkan bahwa secara umum perempuan lebih concern pada Lingkungan dari pada laki-laki. Berdasarkan pada karakteristik demografi perempuan memiliki potensi mempeoduksi [4].

Penelitian D.B Tindal yang dimuat dalam *Journal Social & Natural Resourcess, berjudul Activism and Conservation Behavior in an Environmental Movement : The Contradictory* menyimpulkan bahwa perempuan lebih ekspresif memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan berpotensi untuk mengurangi resiko lingkungan. Perempuan lebih memiliki posisi penting sebagai mediator. Perempuan lebih aktif partisipasinya dalam gerakan-gerakan lingkungan [5].

Paul C. Stern dalam jornal National Research Council USA berjudul *A. Value-Belave-Norm Theory of Support for Social Movement : The Case of Environmentalism*. Gerakan Sosial Baru memiliki perubahan sikap dan perilaku dan menjadi pusat tujuan dalam gerakan-gerakan terhadap lingkungan. Dukungan masyarakat adalah sumberdaya social yang sangat penting dalam gerakan-gerakan sebagai actor/pelaku yang memiliki kekuatan penuh [6].

Perempuan memiliki kekuatan yang lebih dalam mensosialisasikan lingkungan, tanggung jawab social, gerakan social. perempuan memiliki nilai lebih dalam orientasi perilaku terhadap lingkungan. perempuan memiliki perhatian (concern) terhadap lingkungan dan mampu mendistribusikan kesejahteraan (*wealth*), perilaku kuat (*stronger*) dalam sikap dan perilakunya terhadap lingkungan, perempuan memiliki kepedulian dalam perilakunya di rumah tangga untuk mensosialisasi kepada anak-anaknya melalui proses mendaurulang, pendekatan komunitas dan perilaku peduli lingkungan. Perempuan mewujudkan aksi terhadap lingkungan dari status social yang lebih tinggi . Riset tersebut lebih menekankan bahwa perempuan akan memiliki kepedulian terhadap lingkungan mulai dari sikap dan perilakunya yang dipengaruhi oleh status social, kepercayaan (*trust*), pengetahuan (*knowledge*), and tingkat keagamaan [7] [8] [9].

Stone menyatakan bahwa dalam manajemen lingkungan harus diminimalisasi perbedaan (*discrimination*) untuk kesamaan akses dan partisipasi public [10]. Perbedaan tersebut menyangkut cultural atau budaya, geografi, social contextual factor yang mempengaruhi diskriminasi dalam pengelolaan lingkungan, komunitas yang memiliki resiko perlu diidentifikasi dalam partisipasi pengelolaan lingkungan. Aplikasi dalam pengelolaan lingkungan terbangun melalui integrasi atau kesatuan ekosistem, perasaan senasib dalam satu komunitas, peta resiko, dan representasi.

Ekofeminisme merupakan panggilan untuk peningkatan kesadaran, penyembuhan dan persekutuan dengan alam. Beberapa panggilan untuk terlibat secara langsung untuk membentuk konsepsi holistik pengelolaan bumi. Sebuah kesadaran dianggap konsep gerakan yang memerlukan makna terlibat dan pola dalam pengalaman manusia ketika keteraturan ini direproduksi [11]. Penganut ekofeminisme telah menganalogikan bahwa penciptaan dunia sebagai proses kelahiran, seperti perempuan melahirkan setiap hari. Ekofeminisme melihat penciptaan sebagai sesuatu yang indah, memelihara, momen yang sangat alami dan satu dimana wanita terus menerus terlibat. Oleh karenanya ia disebut sebagai "*Dewi*" atau pencipta, pemelihara. Karena wanita menenun kehidupan di bumi ini, wanita memiliki kesatuan yang unik atau keterhubungan dengan bumi. Dimasa lalu keterhubungan khusus dengan bumi ini diakui dan dihargai. Digambarkan bahwa gerakan ekofeminisme ini dilakukan melalui Organisasi "SAGA" sebagai gerakan sosial perempuan untuk menjaga, memelihara bumi sebagaimana mereka menghormati ibu bumi.

Komitmen Internasional, Nasional dan Regional terhadap perubahan iklim mulai mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana telah didukung oleh *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* yang berlangsung di Johannesburg mencetuskan

deklarasi bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang dan partisipasi luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan disegala lapisan dan kelompok masyarakat, termasuk didalamnya kelompok adat dan keterlibatan perempuan. Tujuan dari konferensi perubahan iklim adalah menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (KGR) di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim. Guna mencapai tujuan tersebut disepakati bersama kerjasama untuk saling mengembangkan dan saling berbagi baik kajian ilmiah, teknologi, informasi, sosial dan ekonomi terkait dengan perubahan iklim, termasuk konsekuensi ekonomi, sosial dan strategi kebijakan.

Oleh karenanya peran manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan melestarikan ekosistem hutan dan lahan. Karenanya manusia memiliki peran sebagai insan pelestari hutan dan lahan. Manusia sebagai pengelola sangat diperlukan sebagai upaya agar tetap terjadi keseimbangan lingkungan. Dengan demikian kebutuhan bagi manusia seperti ketersediaan air, kesuburan lahan, ketersediaan bahan pangan dimasa mendatang dapat terpenuhi. Oleh karenanya sangat diperlukan strategi, inovasi dan pelebagaan agar pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan dapat lestari agar kesejahteraan manusia dapat terjamin dimasa mendatang. Semua ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan [12].

3. Metode

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kooperatif (*cooperative inquiry*) yang lebih menekankan aktivitas kelompok sebagai mitra peneliti. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan aktivitas bersama dalam sebuah kelompok berdasarkan norma-norma komunikasi secara alami dan terbuka [13]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Metode Diskusi terfokus (FGD). FGD dilakukan dengan menghadirkan 10 orang yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Analisis Data dilakukan dengan interaktif Analisis Model [14].

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil lapangan menunjukkan bahwa selama ini Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Gapoktan lembaga tersebut seluruhnya dikelola oleh laki-laki saja. Pertemuan tiap bulan juga dilakukan malam hari sehingga perempuan tidak terlibat. Keberadaan Kelompok Tani Hutan Wanita juga belum terbentuk. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan dalam pengelolaan hutan dan lahan, padahal perempuan akan dapat berkontribusi pada berbagai bidang atau seksi misalnya dalam hal edukasi, dalam hal pengembangan ekonomi hutan atau UKM, pada bidang pengolahan hasil dan pemasaran dsb. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang eksistensi perempuan dalam konservasi hutan dan lahan agar perempuan dan laki-laki dapat berperan bersama-sama. Reformasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu dilakukan melalui pelibatan kelompok perempuan untuk membahas issue terkait dengan DAS, mulai dari pengelolaan DAS, perencanaan, peraturan, kelembagaan dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Berbagai langkah dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan kelompok perempuan dan tiap issue dalam kerangka yang menyeluruh dan tidak terpisah. Hubungan keterkaitan antar sektor juga dibahas dan diperhitungkan. Peranserta masyarakat khususnya peran perempuan harus dimajukan. Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dan kemitraan antar sektor perlu dioptimalkan.

Pelibatan masyarakat secara seimbang antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat penting dalam pengelolaan DAS, mengingat amanat nasional Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia P 65/Menhut II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan disebutkan bahwa dalam pembangunan kehutanan masih terjadi kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara kaum laki-laki dan perempuan serta penanganan hak-hak perempuan dibidang kehutanan sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan pembangunan kehutanan. Melalui keterlibatan laki-laki dan perempuan secara adil diharapkan pengelolaan lingkungan DAS melalui konservasi hutan dan lahan akan menjadi optimal dan lebih baik.

Usaha konservasi hutan dan lahan ini akan sangat ditentukan oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar hutan dan para petani di lingkungan DAS. Dari kesadaran dan pemahaman masyarakat akan menentukan perilaku masyarakat dalam pengelolaan DAS Solo Hulu. Usaha-usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi pertanian secara optimal dan menjaga kelestarian lingkungan DAS secara berkelanjutan. Tanah sebagai salah satu faktor produksi pertanian mempunyai fungsi sebagai sumber hara, tepat tanaman tumbuh dan tempat unsur hara dan air ditambahkan. Fungsi-fungsi tersebut dapat hilang/menurun oleh karena kerusakan tanah yang salah satunya disebabkan oleh adanya erosi. Konservasi lahan adalah tindakan penggunaan setiap bidang tanah sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah [15].

Mengintegrasikan gender dalam penelitian kehutanan merupakan pengetahuan bagaimana intervensi dapat dirancang untuk merespons kebutuhan laki-laki dan perempuan, kemampuan dan prioritas, secara khusus lebih pada pengetahuan dan keahlian serta menginformasikan upaya baru secara berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh MAI : *"Integrating Gender into*

forestry research is constrained by the broad perception the forestry is a male dominated profession, a lack of clarity among researches of concept of gender, and a lack of technical skills, interest and or awareness of gender [16]. Perempuan akan dapat banyak terlibat pada konservasi hutan dan lahan dalam mendukung pengelolaan DAS. Di beberapa negara Afrika Selatan dan Amerika Latin perempuan terlibat dalam menjaga hutan melalui gerakan kelompok perempuan. Mereka juga terlibat dalam kelompok organisasi formal dan informal untuk gerakan lingkungan lokal [5].

Keterlibatan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterlibatan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan.

Uraian	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
Terbentuknya	Kelompok tersebut dibentuk oleh Perhutani dalam rangka ikut membatu upaya pelestarian hutan.
Jenis Hutan	Merupakan Hutan Lindung
Pelibatan Masyarakat	Perempuan belum secara langsung dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Sifatnya sebatas mendukung peran suami.
Kepengurusan	Perempuan belum terlibat dalam kepengurusan
Modal sosial	Masyarakat sudah cenderung orientasi pasar karena pada umumnya mereka adalah petani sayur yang sibuk dilahannya sendiri dan di pasar.

Sumber: Hasil observasi.

Faktor penentu pengambilan keputusan dalam konservasi hutan dan lahan dalam upaya pengelolaan DAS ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam internal keluarga sebenarnya tidak ada masalah apabila perempuan ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Mereka juga diijinkan oleh suaminya keluar rumah dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Hanya mereka merasa tidak banyak tahu apa yang harus mereka lakukan selain aktif di PKK. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka kurang disosialisasi peran mereka dalam pengelolaan lingkungan. Faktor eksternal berkontribusi besar bahwa perempuan banyak tidak terlibat antara lain adalah dalam proses kebijakan, dalam proses pengambilan keputusan dan belum optimalnya tindakan *avirmatif action*.

Representasi perempuan dalam LMDH belum ada, perempuan atau istri sifatnya sebagai relawan membantu suami yang anggota LMDH atau pengurus. Selaku relawan yang dikerjakan oleh perempuan adalah: (a) Menanam, (b) Memupuk, dan (c) Menyiangi rumput.

Marjinalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan masih berada sebagai warga kelas dua. Dalam LMDH yang terlibat dalam kepengurusan LMDH semuanya adalah laki-laki, perempuan belum terlibat secara nyata dalam kepengurusan LMDH Segoro Gunung. Meskipun secara lapangan perempuan bersifat membantu pihak suami di lahan hutan dalam hal penyiangi tanaman, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Dalam proses pengambilan keputusan perempuan belum terlibat secara nyata sehingga mereka tidak punya akses terlibat dalam perencanaan.

Pranata Sosial dan nilai-nilai sosial yang ada masih cenderung mengedepankan peran laki-laki untuk berkontribusi dalam pembangunan di lingkungannya. Kebanyakan di wilayah Segoro gunung kelompok tani konservasi dan LMDH cenderung melibatkan laki-laki, sedangkan perempuan lebih diserahi pada urusan-urusan rumah tangga atau lebih bersifat membantu tugas-tugas suami. Dalam kasus dilapangan menunjukkan bahwa rapat-rapat rutin yang dilakukan cenderung mengundang laki-laki dan waktunya dilakukan pada malam hari. Kepengurusan yang disusun hampir semuanya laki-laki dan belum memasukkan perempuan sebagai bagian dari kepengurusan yang terjadi. Untuk tugas-tugas keseharian perempuan bersifat membantu suami. Misalnya di Segoro Gunung dalam kasus mencari makan ternak bisa dilakukan oleh perempuan. Dalam rapat-rapat terkait dengan pemberian bantuan ternak dilakukan oleh laki-laki. Menerima bantuan bibit diterima oleh laki-laki dan menanam dan memelihara pohon dilakukan oleh perempuan.

Banyak hal telah disadari bahwa peran perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan melalui pelestarian sumberdaya lahan dan hutan. Pola pengambilan keputusan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan dapat dilihat Tabel 3.

Tabel 3. Pola Pengambilan Keputusan Perempuan Dalam Konservasi Hutan dan Lahan

<i>Focussed Issue</i>	Peran Dalam Pengelolaan lahan dan Hutan	Kendala dalam melakukan peran
Waktu	Perempuan punya waktu lebih sedikit dalam konservasi hutan dan lahan	Terkadang tidak sesuai dengan waktu senggang yang dimiliki perempuan misalnya pertemuan dilakukan malam hari
Teknologi	Perempuan kurang memiliki kemampuan	Belum dipikirkan teknologi yang perempuan

teknologi yang terkait dengan teknologi fisik
konservasi hutan dan lahan

akan banyak terlibat dalam konservasi lahan.

Sumber: Hasil observasi

Kebiasaan merupakan aktifitas yang dilakukan secara terus menerus dan membentuk budaya. Budaya menyangkut cara manusia berfikir, merasa dan bertindak yang terakumulasi dalam perilaku kolektif yang akan menjadi kebiasaan setiap harinya. Dalam kehidupan dan keberadaan manusia sangat ditentukan oleh potensi alam, sehingga secara perasaan manusia seperti sangat bergantung pada alam yang akan menentukan kehidupannya. Oleh karenanya manusia akan berperilaku menjaga alam. Pemikiran dan perilaku ini sangat mengutamakan alam karena mendorong manusia untuk berusaha hidup selaras dengan alam [17]. Pada kehidupan masyarakat desa perempuan memiliki kebiasaan menyemai, dan itu hampir dilakukan dalam setiap kehidupannya untuk menyemai benih-benih dari buah-buahan yang mereka lakukan. Sebenarnya ini menjadi bibit potensi perempuan dan akan terlibat dalam upaya semai, saphi dan tanam sehingga bibit pohon akan dapat dihasilkan dari komunitas perempuan yang terlibat yang akhirnya menjadi budaya menanam dilahan. Seharusnya ini menjadi ruang yang perlu difasilitasi sehingga perempuan akan terbiasa dengan kehidupan menanam pohon. Ada kebiasaan positif yang mendukung konservasi. Contoh diatas merupakan contoh kegiatan perempuan yang mendukung konservasi hutan dan lahan. Namun juga ada kebiasaan yang bertentangan dengan konservasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah Segoro Gunung yaitu perempuan melakukan pengambilan kayu pada lahan hutan. Kebiasaan ini memang harus diatasi dengan memberikan ruang keterlibatan ekonomi sebagai ganti agar mereka tidak mengambil kayu bakar di hutan.

Harapannya ketika perempuan terlibat dalam organisasi kelompok perempuan berperan menjadi pionir yang sesungguhnya dalam pengelolaan lingkungan. Melalui gerakan aksi bersama perempuan akan banyak belajar untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan pengelolaan lingkungan, disitu perempuan juga mengenali masalah dan mencoba mencari alternatif pemecahan, kelompok perempuan mulai belajar manajemen ketika nantinya berdiri koperasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan sehingga perempuan menjadi lebih berdaya. Melalui gerakan perempuan tersebut akan memunculkan kesadaran kolektif (*conscious*) nyata yang didesign dari dirinya sendiri bersama kelompoknya. Disinilah munculnya kesadaran, kemauan dan solidaritas untuk melakukan aksi kolektif yang berhasil membawa perubahan dan lebih berlanjut (*sustainable*).

5. Kesimpulan

Kelembagaan konservasi hutan dan lahan yang ada, baik pada tingkat LMDH maupun Kelompok Tani masih belum berbasis kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan lahan masih masih sebatas melengkapi atau membantu suami sebagai kepala rumah tangga pertanian dan belum terlibat secara khusus terkait dengan potensi yang dimiliki perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan belum bisa optimal berkontribusi dalam upaya konservasi hutan dan lahan pada wilayah DAS Bengawansolo Hulu. Perspektif gender juga merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia untuk berkontribusi dalam konservasi hutan dan lahan di wilayah DAS hulu.

Konservasi hutan dan lahan masih bekerja pada tataran aras atas dan menjadikan kelompok tani sebagai sasaran kegiatan sehingga belum sepenuhnya menempatkan kelompok tani atau LMDH sebagai subyek pembangunan yang mampu menjaga lingkungan dengan baik. Untuk itu *Community Based Environment (CBE)* menjadi sangat diperlukan untuk memperkuat kelompok paling bawah yang bersentuhan dengan hutan dan lahan untuk mengurangi bencana yang terjadi.

Kebijakan dan partisipasi masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam konservasi hutan dan lahan pada wilayah DAS Bengawansolo Hulu masih bersifat program dari atas (*topdown*). Hal ini bisa dilihat bahwa kegiatan konservasi hutan dan lahan (dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari bawah. Belum menjadikan kelompok sebagai aktor utama dalam perencanaan program, masih bersifat rutinitas dan belum menjadi kelompok yang memiliki bargaining position yang tinggi.

Kondisi lingkungan DAS dan daya dukung lingkungan yang sudah semakin kritis sebagai akibat dari kerusakan hutan dan lahan di daerah hulu yang ditandai oleh tingginya erosi dan sedimentasi, terganggunya sistem ekologis hutan dan tata air, kebakaran hutan, dan lahan kritis seharusnya menjadikan prioritas kebijakan yang mengoptimalkan peran sumberdaya manusia sebagai pengelola. Aspek manusia menyangkut ecoliteracy, kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan akan pentingnya menjaga lingkungan, budaya dan perilaku yang mendukung pelestarian untuk mencegah atau mengurangi bencana.

Diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu memperbaiki melalui monitoring dan evaluasi program untuk kedepan yang lebih pada penanganan dan pengendalian tanah longsor sehingga tidak terjadi penumpukan resiko bencana yang makin hari makin tidak terkendali, terutama pada daerah-daerah rawan longsor.

Pengembangan modal sosial dan modal budaya sebagai alternatif program yang mampu memberikan solusi bagi upaya pelestarian yang diharapkan akan dapat memperkuat habitat sehingga membentuk dan mengarahkan tata kehidupan dan perilaku masyarakat sekitar hutan yang peduli konservasi hutan dan lahan. Secara normatif budaya terkait erat dengan etika, perilaku dan kebiasaan masyarakat yang lebih terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan, sedangkan modal social menyangkut jaringan hubungan yang membentuk kehidupan social seperti kekerabatan, persahabatan, trust, solidaritas dan

kepedulian yang mendasari gerak dan kerja suatu kelompok masyarakat. Modal sosial tersebut bukan sesuatu yang terberikan melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan.

Modal sosial yang kuat akan berpengaruh pada partisipasi yang kuat dan akan membentuk komunitas yang kuat yang mampu melestarikan sumberdaya hutan dan lahan. Ada banyak potensi dan nilai strategis dari hutan dan lahan namun apabila tidak dikelola secara baik maka bencana akan terjadi. Ia tidak akan bermanfaat apa-apa apabila tidak dikelola dengan baik.

Referensi

- [1] Suntoro, 2010. *Manajemen Sumberdaya Lahan Ramah Lingkungan*. Faperta UNS. Surakarta.
- [2] Donie, S. 1996. Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Konservasi Tanah Terhadap Pengamanan Waduk Wonogiri. *Dalam Prosiding Diskusi Hasil Penelitian BTP DAS Surakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*.
- [3] Nurhaeni IDA, Rara S, Trisni U. 2008. *Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Hibah Bersaing tahun ke-1 DIKTI
- [4] Price CE. 2011. "Women and the Environment: Mediating and Moderating Effects of Gender and Demographic Characteristics of Environmental Concern." PhD diss., University of Tennessee, 2011. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1116
- [5] Tindall, 2003. *Activism and Conservation Behaviour in an Environmental Movement*, Department Sociology, Canada.
- [6] Stern PC. 2000. Toward a Coherent of Environmentally Significant Behaviour. *Journal of Social Issues*, Vol 36, pp.407-424.
- [7] Blocker TJ and Eckberg DL. 1997. Gender and environmentalism: Results from the 1993 general social survey. *Social Science Quarterly*, pp.841-858.
- [8] Zelezny LC, Chua, PP and Aldrich C. 2000. New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism. *Journal of Social issues*, 56(3), pp.443-457.
- [9] Hunter, L.M., Hatch, A. and Johnson, A., 2004. Cross-national gender variation in environmental behaviors. *Social science quarterly*, 85(3), pp.677-694.
- [10] Stone JV. 2002. *Public participation in environmental management: seeking participatory equity through ethnographic inquiry*. Graduate Theses and Dissertations. University of South Florida. <https://scholarcommons.usf.edu/etd/1529>
- [11] Mc Gee, T.G. 1996. *Perombakan Struktural dan Kota di Dunia Ketiga, Suatu Teori Involusi Kota*. LP3ES. Jakarta
- [12] Zain, AS. 1997. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [13] Denzin NK. 2009. *Hand Book of Qualitative Research*. Penerjemah Dariyatno, Penerbit Pustaka Pelajar. Mile dan Hubberman
- [14] Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- [15] Arsyad, S. 2003. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press. Bogor.
- [16] Mai YH. 2011. Gender Analysis in Forestry Research: Looking Back and Thingking Ahead. *Journal International Forestry Review* .Vol 13 (2).
- [17] Tasdiyanto. 2011. *Budaya lingkungan akar Masalah dan Solusi Krisis Lingkungan*. Tiara Wacana, Yogyakarta.